

Stop Pencitraan Peduli Rakyat
Plat Kendaraan Bermotor
Bukan Tugas Gubernur

Oleh: Sutrisno Pangaribuan, Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas)

UU No. 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Bab II Pajak dan Retribusi Daerah, Bagian Kesatu, Pajak, Paragraf 1, Jenis Pajak, Pasal 4, ayat 1, pajak yang dipungut pemerintah provinsi terdiri atas: a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), c. Pajak Alat Berat (PAB), d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), e. Pajak Air Permukaan (PAP),

■ Bersambung ke Hal 11

Pergeseran APBD dan Korupsi Jalan
Ketika Administrasi
Publik Disalahgunakan

Oleh: Mardiansyah Manurung, Plt Ka Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP UISU

SUMATERA Utara kembali menjadi sorotan nasional. Bukan karena capaian kinerja pemerintahan yang membanggakan, tetapi karena polemik dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025, yang dilakukan hingga enam kali. Masalah ini mencuat bersamaan dengan kasus korupsi pembangunan jalan yang

■ Bersambung ke Hal 11



Kasus Korupsi Minyak
Mentah Pertamina

Berkas 9
Terdakwa
Dilimpahkan
ke PN Tipikor
Jakarta Pusat

Jakarta, MIMBAR - Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan pelimpahan berkas perkara terhadap 9 terdakwa pada Rabu 1 Oktober 2025 ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terkait perkara tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama

■ Bersambung ke Hal 11

Sidang Lanjutan Kasus Korupsi Jalan di Sumut
Mantan Kapolres
Tapsel Akui Terlibat



Medan, MIMBAR – Mantan Kapolres Tapanuli Selatan (Tapsel), AKBP Yasir Ahmadi, dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap proyek peningkatan jalan provinsi ruas Hutaimbaru–Sipiongot, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (1/10/2025).

Dalam keterangannya, Yasir mengakui keterlibatannya, yakni memperkenalkan terdakwa Akhirun Piliang alias Kirun, Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group (DNG), kepada mantan Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Ginting. “Iya benar, karena Akhirun sering mengerjakan jalan di Tapsel,” ujar Yasir

■ Bersambung ke Hal 11

Hakim Minta KPK
Buka Sprindik Baru

HAKIM Ketua Khamozaro Waruwu meminta jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar membuat surat perintah penyidikan (sprindik) baru terkait pergeseran anggaran dalam proyek jalan di Hutaimbaru-Sipiongot, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta).

■ Bersambung ke Hal 11

Topan Ginting
Dipastikan
Hadir Hari Ini

JAKSA penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menghadirkan Topan Obaja Ginting selaku mantan Kepala Dinas (Kadis) PUPR Sumatera Utara (Sumut), dalam sidang lanjutan dugaan suap proyek peningkatan jalan provinsi ruas Hutaimbaru–Sipiongot, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Sumut.

“Besok (hari ini, red), kita akan menghadirkan yang bersangkutan ke persidangan,” kata JPU KPK Eko Wahyu saat ditemui usai sidang di

■ Bersambung ke Hal 11



Jadwal
Salat

9 RABI'UL AKHIR 1447 H

Imsak : 04:48 WIB

Subuh : 04:58 WIB

Zuhur : 12:17 WIB

Ashar : 15:28 WIB

Maghrib : 18:20 WIB

Isya : 19:28 WIB

■ Untuk kota Medan sekitarnya

Peringati Hari Kesaktian Pancasila

Gubernur Beri Tali
Asih ke Keluarga
Letda Sujono

Simalungun, MIMBAR - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyerahkan tali asih kepada keluarga Letda Sujono, pada Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2025 di Monumen Bandar Betsy, Kabupaten Simalungun.

■ Bersambung ke Hal 11

Medan, Kota Tanpa Aturan?

Oleh: Ngatirin

DI Medan, gedung bisa berdiri lebih cepat daripada izin yang keluar. Apartemen menjulang tanpa dokumen lengkap. Ruko berdiri di pinggir jalan tanpa garis sempadan. PAD yang seharusnya jadi pemasukan daerah malah terbang ke kantong oknum. Segel hanya jadi cat merah yang bisa hilang dengan selempar amplop.

Aturan ada, tapi dijadikan bahan tawar-menawar. Hukum hadir, tapi diperlakukan seperti panggung sandiwara. Pejabat yang mestinya mengawasi justru ikut bermain. DPRD yang mestinya lantang mengkritik justru ikut meneguk manisnya bancakan. Akhirnya rakyat bertanya, aturan itu masih ada

■ Bersambung ke Hal 11

Kasus Penggelapan
'Membeku' di
Polres Samosir

Diduga Terjadi 'Permainan Uang'

Samosir, MIMBAR - Aroma 'permainan uang' tercium dari Mapolres Samosir. Itu setelah kasus penggelapan yang dilaporkan Maruli U. Tobing hingga kini tak kunjung berujung. 'membeku'. Usia laporannya telah lebih dari 2,5 tahun.

Kasus ini berawal dari laporan Maruli U.Tobing ke Polres Samosir, atas penggelapan uang yang dilakukan pengelola Hotel Toledo di Tuktuk, Samosir. Ia melaporkan Tio Dohar Lumbantobing dan Dinar Batubara dengan Pasal Penggelapan.

Saat itu, korban juga telah membawa saksi bersama 90 bukti transfer uang ke pihak ketiga. Jumlahnya ratusan juta rupiah.

Tapi, tetap saja Polres Samosir belum menetapkan tersangka, padahal sudah memenuhi dua unsur yang dapat menaikkan status laporan tersebut.

■ Bersambung ke Hal 11

■ Tanda-tanda ...
■ He..he..he..

Hidayah

Berobat Hanya
dengan KTP

Oleh Dr. A. Rasyid, MA

Mulai 1 Oktober 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meluncurkan kebijakan yang cukup progresif: masyarakat bisa berobat hanya dengan menunjukkan KTP, tanpa perlu membawa kartu BPJS atau surat rujukan lainnya. Kebijakan ini tentu disambut dengan antusias, karena seolah menghadirkan harapan baru bagi warga yang selama ini terkendala birokrasi dalam mengakses layanan kesehatan.

Namun, di balik semangat baik kebijakan ini, terdapat sejum-

■ Bersambung ke Hal 11

Alamat : Jalan Denai Kompleks Grand Denai No. 185 L , Medan Sumut, Telp. (061) 733 0737, Fax (061) 733 2457, Email : mimbarumum@yahoo.com, mimbarumum_058@yahoo.co.id, mimbarumum99@gmail.com